

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 3

TAHUN 2004

Yudhoyono Dituding Terlibat Kasus Buyat

Jakarta, Sinar Harapan

Kasus penyakit kulit akibat pencemaran yang dialami oleh warga Buyat Sulawesi Utara kini masuk ke areal politik dan hukum. Koalisi Rakyat yang berdemonstrasi ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (18/8) menuding calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan peristiwa tersebut.

Saat itu ia menjabat Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) dengan tetap merestui berjalannya PT Newmont Minahasa Raya (NMR) yang pada tahun 2000 sebenarnya harus ditutup. Menanggapi tuduhan ini, pihak Yudhoyono mengaku tidak akan meladeninya.

Kejagung sendiri mengatakan akan meneliti lebih dahulu pengaduan tersebut. Sedangkan anggota tim sukses Yudhoyono-Jusuf Kalla, Suko Sudarso menyerahkan hal itu ke mekanisme hukum yang berlaku dan tidak menanggapi secara serius.

"Kalau dibilang bertanggung jawab saat menjadi Mentamben, apa memang Mentamben punya kewenangan untuk memperlancar usaha Newmont dan lainnya? Kita tidak ada sikap khusus soal ini. Lebih baik diselesaikan sesuai proses hukum saja," kata Suko Sudarso yang dihubungi SH, Rabu (18/8) malam.

Suko mengatakan, dirinya tak menafikan adanya kaitan naiknya isu tersebut dengan menguatnya kans Yudhoyono selaku capres. Pihaknya, tidak akan meladeni isu tersebut dengan pernyataan atau sikap khusus.

Belum Bersikap

Sementara itu, Kejagung belum menentukan sikap untuk memeriksa atau tidak Yudhoyono atas tuduhan yang diadakan oleh Koalisi Rakyat. Kejagung, dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan dan Penyuluhan Hukum, Kemas Yahya Rahman, akan meneliti terlebih dulu permintaan tersebut. Sejauh ini, Kejagung belum mengetahui duduk perkara

ra kasus tersebut dan kaitannya dengan Yudhoyono.

Di kesempatan berbeda, sekitar 100 orang yang menamakan kelompoknya Koalisi Rakyat mendatangi Kejagung dan kemudian berdemonstrasi di sana. Mereka mendesak Yudhoyono diperiksa terkait beroperasinya PT NMR di Minahasa.

Dugaan keterlibatan itu, menurut koordinator Koalisi Rakyat AA Sofwi, adalah sebagai Mentamben saat itu. Capres Partai Demokrat itu mengubah situasi dengan mempengaruhi Menteri Dalam Negeri (saat itu Surjadi Sudirdja) untuk meluluskan operasionalisasi Newmont. Sayangnya, bagaimana cara Yudhoyono dan kebijakannya selaku Mentamben memperhalus jalannya operasional Newmont, tidak dipaparkan jelas.

Koalisi Rakyat tidak berhasil bertemu Jaksa Agung MA Rachman atau pun Kemas Yahya Rahman. Usai memaparkan pengaduannya ke sejumlah staf Kejagung mereka menggelar orasi. (rik/din)